



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**



**BATUSANGKAR
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat di era globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penanggulangan bencana.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi BPBD dalam Rencana Strategis BPBD. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga Rencana Strategis BPBD yang dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam

rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki BPBD Kabupaten Tanah Datar, maka disusunlah Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis yang disusun oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah

Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja BPBD dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah.
- 2) Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode lima tahunan.
- 3) Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
- 4) Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan

lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan bahwa BPBD Kabupaten Tanah Datar merupakan koordinator di Bidang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku *ex-officio* dan sebagai pimpinan pelaksana setingkat II/b.

a. Tugas

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang serta mengkoordinir tenaga relawan.

- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan daerah diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

c. Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Unsur Pengarah
- 3) Unsur Pelaksana
 - a) Kepala Pelaksana
 - b) Sekretariat, terdiri dari
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Bagian Program
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - (1) Seksi Pencegahan
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan
 - d) Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) Seksi Kedaruratan
- (2) Seksi Logistik
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - (1) Seksi Rehabilitasi
 - (2) Seksi Rekonstruksi
- 4) Satuan Tugas
- 5) Unit Pelaksana Teknis
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

Sekretariat :

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas;
 - b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga;
 - d) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - e) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - f) Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - g) Pelaksanaan dan perumusan rencana stratejik;

- h) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;
- i) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang berdasarkan azas keseimbangan; dan
- j) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, sesuai urusan yang menjadi kewenangan
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Kedaruratan

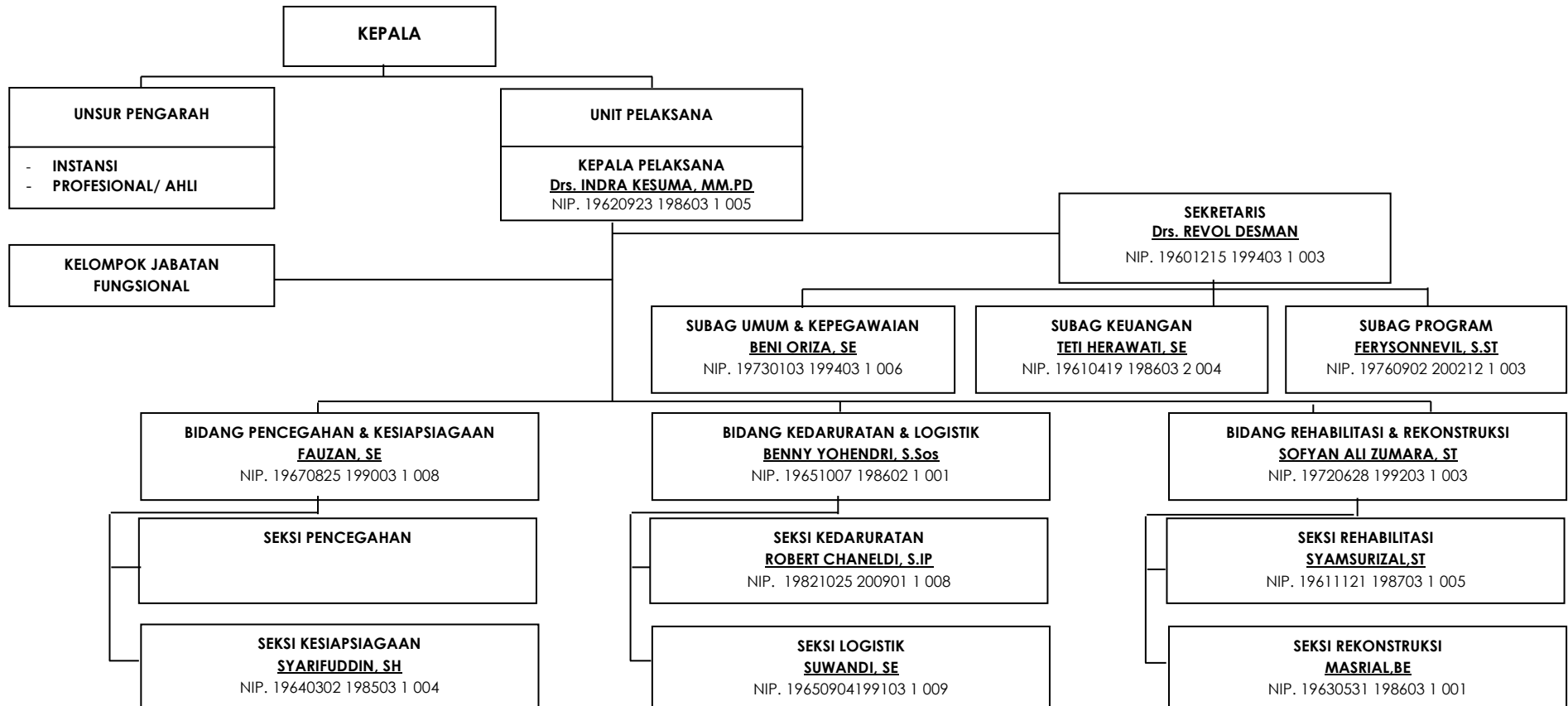
dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TANAH DATAR
 (Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010)

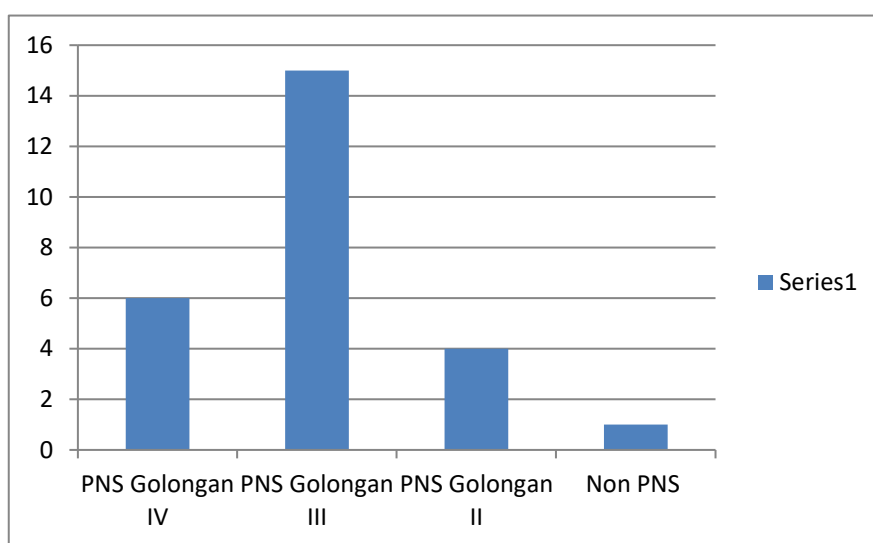


2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

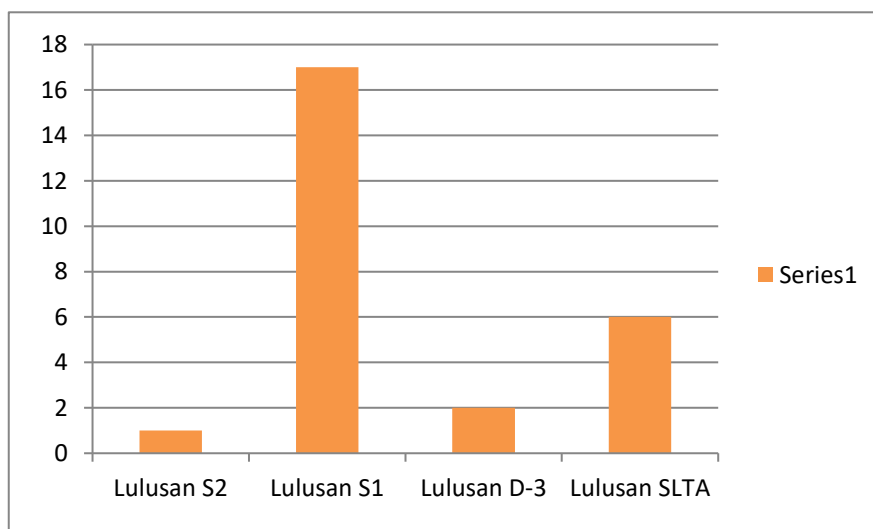
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian BPBD Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 26 orang, yang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Orang Non PNS.

Berdasarkan komposisi kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:



Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada BPBD dapat dikelompokkan sebagai berikut :



2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Mobil Dinas	4	Baik
2.	Mobil Rescue	2	
3.	Mobil Ambulance	1	
4.	Mobil Dapur Lapangan	1	
5.	Kendaraan Truk Serbaguna	1	
6.	Sepeda Motor Trail	6	
7.	Tenda Posko	3	
8.	Tenda Sekolah	1	
9.	Tenda Summer Time 3/4	3	
10.	Tenda Komando Lapangan	4	
11.	Tenda Pengungsi	2	
12.	Tenda Pengungsi + Lampu Penerangan	3	
13.	Tenda DUM	10	
14.	Tenda Pelton	2	
15.	Tenda Keluarga	10	
16.	Tenda Regu	3	
17.	Mesin Pompa Air	2	
18.	Pelampung Pompa Air	2	
19.	Water Treatment Fortabel+Gense+Tabung	1	
20.	Tenda Summer Time ¾	3	
21.	Tenda Komando Lapangan	4	
22.	Genset	6	
23.	Lampu Emergency Tenaga Surya	13	
24.	Perahu Karet	3	
25.	Perahu Aluminium	1	
26.	Perahu Polyteline	2	
27.	Auto Stop	2	
28.	Pulley Tandem	3	
29.	Pulley Single	5	
30.	Jumar	2	
31.	Kerel	2	
32.	Full Body Harnest	2	
33.	Head Lamp	13	Baik
			Rusak
34.	Karamantel	13	

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

35.	Desender	5	
36.	Carabiner	20	
No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	
37.	Sit Harnest	1	
38.	Gri-Gri	1	
39.	Tandu Basket	2	
40.	GEA/Tandu Scoop	1	
41.	GEA/Tandu Folding Stretcher	1	
42.	Pertzl/Croll	1	
43.	American Scuba Divers/Tabung Ascud 80 Cuff	2	
44.	Cressi/Bouyancy Contro Device (DVB)	1	
45.	Cressi/Regulator Seac Psyinchro	1	
46.	Cressi/Octopus Seac Psyinchro	1	
47.	Cressi/Console 2 Seac	1	
48.	Cressi/Wettsuit Cressi Summer 3 mm	1	
49.	Amscud/Fin Amscud Sigma	1	
50.	Amscud/booties amscud Challenge	1	
51.	Cressi/Fin Cressi Fog	1	
52.	Cressi/Booties Cressi Minorca	1	
53.	Cressi/Pisau Cressi Vigo	1	
54.	Cressi/Tas Cressi Jungle	1	
55.	Wibbing/Tali Temali	3	
56.	Amscud/Timah Pemberat 1 kg	5	
57.	Cressi/Weight Bell	1	
58.	Amscud/Mask Amscud Neptune	1	
59.	Amscud/Smorkel Amscud Dolphin	1	
60.	Amscud/Smorkel Amscud Alpha	1	
61.	Cressi/Snorkel Cressi Gamma	1	
62.	Ring Boy	10	
63.	Pelampung	21	
64.	GPS	4	
65.	Kompas	7	
66.	Handy Talky	12	
67.	Radio Komunikasi RIG	5	
68.	Radio Kuminikasi SSB	1	
69.	Chain Saw	4	
70.	Tragia	3	
71.	Senter Searchlight	1	
72.	Teropong Binocooler	1	
73.	Gedung Kantor BPBD	1	
74.	Gedung Merangkap Kantor Pusdalops	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPBD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah pelaksanaan pemantaun daerah rawan bencana		10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	120%	120%	120%	120%
2.	Jumlah dokumen penanggulangan bencana (Database, SOP, Renkon)		1 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	1 buah	3 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%	100%	66,67%	66,67%	66,67%
3.	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi penanggulangan bencana		150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dalam penanggulangan bencana		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%

Output pelayanan yang dilaksanakan pada BPBD terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, berupa pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam, pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana, fasilitasi potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan, peningkatan SDM kelembagaan dan aparatur penyelamat kebencanaan, gladi posko/gladi lapangan (simulasi penanganan bencana), penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana serta penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
- 2) Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam, berupa rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sungai, pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana alam serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana alam.

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal diperlukan anggaran biaya operasional BPBD Kabupaten Tanah Datar, seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Datar

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	-	200.552.000	50.000.000	50.000.000	267.250.000	-	200.162.000	46.473.400	46.194.925	250.609.175	-	99,81%	92,95%	92,39%	93,77%	108.687.900	94,73%
2	Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana	23.150.000	45.150.000	25.000.000	20.000.000	50.000.000	23.123.750	44.262.250	13.804.000	17.171.000	40.085.000	99,89%	98,03%	55,22%	85,85%	80,17%	27.689.200	83,83%
3	Dokumen penanggulangan bencana (Data Base, SOP dan Rekon)	-	68.000.000	82.500.000	80.000.000	135.300.000	-	60.826.900	23.084.650	65.722.600	76.083.700	-	89,45%	27,98%	82,15%	56,23%	45.143.570	63,95%
4	Masyarakat yang mendapat sosialisasi penanggulangan bencana	145.600.000	349.900.000	210.000.000	137.816.000	171.500.000	136.889.000	290.588.800	138.645.650	124.539.300	125.048.000	94,02%	83,05%	66,02%	90,37%	72,91%	163.142.150	81,27%
5	Sarana dan prasarana evakuasi dalam penanggulangan bencana	162.963.600	95.000.000	62.500.000	51.500.000	49.150.000	161.505.350	93.725.900	50.137.825	50.137.825	46.540.000	99,11%	98,66%	80,22%	97,36%	94,69%	80.409.380	94,01%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai institusi pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Datar, BPBD kedepan diharapkan memiliki kemampuan dalam penanggulangan kebencanaan yang profesional, terpadu dan menyeluruh serta bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, untuk itu BPBD kedepan harus :

- 1) Memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam penanggulangan bencana, untuk itu diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan kebencanaan sehingga diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- 2) Begitu juga dengan sumber daya peralatan, kedepan diharapkan BPBD memiliki peralatan sesuai standar nasional untuk melaksanakan tugas kebencanaan, sehingga sumber daya manusia yang ada sejalan dengan sumber daya peralatan yang dimiliki oleh BPBD.
- 3) Dalam pemberdayaan tenaga relawan/SAR diperlukan kekuatan hukum terhadap status relawan/SAR sehingga relawan/SAR dalam mengemban tugas kemanusiaan mempunyai kepercayaan diri dalam menunaikan tugas tersebut.
- 4) Keberadaan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana, perlu diberikan perhatian khusus, karena Pusdalops ini merupakan posko pengendalian apabila terjadi bencana di Kabupaten Tanah Datar.
- 5) Banyaknya kejadian bencanadi Kabupaten Tanah Datar, belum sepenuhnya didukung oleh pendanaan yang digunakan untuk operasional petugas,relawan/SAR. Adapun kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Datar adalah :
 - a) Tanah longsor
 - b) Jembatan runtuh
 - c) Orang tertimpa pohon
 - d) Orang tenggelam

- e) Angin Puting beliung
- f) Pohon tumbang
- g) Orang hilang
- h) Banjir bandang
- i) Keracunan makanan
- j) Orang terbakar
- k) Orang meninggal gantung diri/sengatan listrik
- l) Kecelakaan mobil masuk jurang/danau
- m) Erupsi Gunung Api Marapi
- n) Kebakaran

2.4.1 Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik kegiatan rutin maupun dari belanja tidak terduga.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana.
- 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

b. Kelemahan.

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Belum memadainya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Belum memadainya kinerja dan kapabilitas sumber daya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Belum optimalnya sinergi dan koordinasi lintas

sektoral dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

2.4.2 Faktor Lingkungan Eksternal.

a. Peluang

- 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana.
- 3) Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar Daerah)
- 4) Adanya peran serta masyarakat, relawan, Satgas Siaga Bencana Nagari, Satgas Siaga Bencana Sekolah, Organisasi Masyarakat dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 59 tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka dapat diinventarisir isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai dan belum sesuai dengan standar penanggulangan bencana nasional.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, baik aparatur maupun masyarakat.
- c. Potensi yang ada pada masyarakat dalam penanggulangan bencana belum terinventarisir dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan belum terlaksana secara menyeluruh dan maksimal.
- e. Perlunya ditingkatkan kapasitas SDM aparatur penyelamat kebencanaan.
- f. Pelaksanaan Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana) lebih diintensifkan, karena merupakan salah satu cara dalam Pengurangan Risiko Bencana.
- g. Perlunya penyempurnaan penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana serta mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan bencana.
- h. Diperlukan kegiatan terpadu dan terkoordinir dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana alam.
- i. Dalam pelaksanaan operasional penanggulangan bencana perlu disusun regulasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rencana kontinjensi per jenis kebencanaan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		-	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Kabupaten Tanah Datar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
- c. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Tabel 3.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana			
2.	Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal			
3.	Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinir dan menyeluruh			

3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2015–2020) adalah :

- a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas tingkat pusat dan daerah.
- b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Apabila kita melihat sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dapat dikatakan secara umum sasaran yang hendak dicapai sudah diakomodir oleh Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar, namun yang menjadi penghambat kegiatan ini terlaksana dengan baik di Kabupaten Tanah Datar adalah :

- a. Masih rendahnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Masih sedikitnya dukungan dana untuk kegiatan tersebut
- c. Sarana dan prasarana yang jauh dari ketersediaan.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Sasaran Rentsra BPBD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya resiko bencana	Belum tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD untuk melakukan pengkajian resiko bencana - Terbatasnya anggaran yang tersedia 	<p>Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Kajian Resiko Bencana.</p> <p>Catatan : Anggaran terbatas</p>
2.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persediaan sarana dan prasarana tanggap darurat yang tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat 	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampung. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam mencakup sumber daya yang terdapat di darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar serta pemanfaatan menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tanah Datar. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek penggandaan yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjalin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keaneka ragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2031 ditetapkan prioritas penataan ruang Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

- a. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang sistem kegiatan wilayah
- b. Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan

- bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
 - d. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
 - e. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata sesuai daya dukung lingkungan
 - f. Peningkatan pemanfaatan budidaya sesuai daya tampung dan dukungan lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.

Berpedoman pada RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009 – 2029 fokus pembangunan daerah pada tahun 2016 – 2021 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan-kawasan dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Nagari pusat pertumbuhan, Nagari tertinggal dan kota pusat pertumbuhan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Telaahan Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran strategis pembangunan dibidang kebencanaan, maka diperoleh isu-isu strategis memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena masih kurangnya sumber daya manusia, baik kuantitas maupun dari segi kualitas, sarana dan prasarana yang masih belum mendukung serta anggaran yang masih minim.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana.
- c. Diperlukan pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana, pendataan dan inventasir dampak pasca bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan *organisasi*.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja. Berikut dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1.	Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana	1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan penanggulangan bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Nagari Siaga Bencana	6,25%	6,25%	9,38%	12,50%	15,83%
		Meningkatnya kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana	Respon time	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi, misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi BPBD selama periode 2016-2021 adalah:

“Menyediakan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana”

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka BPBD menetapkan arah kebijakan dalam penanggulangan bencana sebagai berikut :

***“Penyediaan Informasi, Sarana Prasarana dan
SDM Penanggulangan Bencana”***

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1.	Menyediakan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana	1.1	Penyediaan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

MISI : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Menyediakan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana	Penyediaan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana		
	Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BPBD dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021. Program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Pengelolaan Penanggulangan Bencana				Persentase Penanganan Dampak Bencana																					
	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana			Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik																					
				Persentase Nagari Siaga Bencana																					
		1030032	Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi	32,25%	-	-	41,53 %	3.309.895.409,50	46,15 %	3.466.661.789,87	56,45 %	3.816.381.366,92	61,53 %	4.330.318.150,01	61,53%	21.687.173.989,69	Bidang RR	Tanah Datar						
		1030032	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan																						
		1030032	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan																						
		1030032	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai																						

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1	0	1	0	0	3	1	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Laporan Infrastruktur Yang Rusak Pasca Bencana	1 Laporan														
		3			5	3	2	2		Usulan Bantuan Pasca Bencana Untuk Masyarakat	10 Usulan														
		1	0	1	0	0	3	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	1 Laporan														
		3			5	3	2	3		Dokumen Jitu Pasna (DaLA, HRNA dan PDNA) Yang Tersusun	1 Dokumen														
		1	0	1	0	0	3	1	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam	Persentase Kesiapan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	100%	-	-	100 %	233.390.060,93	100 %	238.332.998,05	100 %	233.223.305,76	100 %	259.819.089,00	100 %	964.765.453,74	Bidang PK dan Bidang KL	Tanah Datar
		1	0	1	0	0	2	0	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Lokasi Pemantauan Potensi Bencana Alam	10 lokasi														
		5			5	3	2	1		Jumlah Dokumen Informasi Potensi Bencana Alam	1 Dokumen														

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	0	1	0	0	2	0	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah Jenis Alat Khusus SAR Yang Diadakan	11 Jenis														
		1	0	1	0	0	2	0	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan	50 Orang														
		5	5	3	2	5		Jumlah Peserta Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana		100 Orang															
		1	0	1	0	0	2	0	Fasilitasi Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan	Jumlah Relawan Pusdalops-PB Yang Dibayarkan Honor dan Operasionalnya	15 Orang														

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	0	1	0	0	2	0	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencana	Jumlah Peserta Jambore Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Sumbar	18 Orang														
		1	0	1	0	0	2	1	Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	Jumlah Peserta Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	200 Orang														
		1	0	1	0	0	2	1	Penyusunan Database dan Peta Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Database	1 Dokumen														
										Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana	1 Peta														
										Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen														
		1	0	1	0	0	2	1	Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kebencanaan	1 Dokumen														
		1	0	1	0	0	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	100 %	-	-	100 %	450.000.000	100 %	472.500.000	100 %	496.125.000	100,00 %	520.931.250	100,00 %	1.939.556.250	Sekretariat	Tanah Datar

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	0	1	0	0	0	0	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Materai	420 Lembar														
		5		5	3	1	1			Jumlah Paket Pengiriman	2 Kali														
		1	0	1	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon	Rp. 11.760.000														
		5		5	3	1	2			Jumlah Volumen Air Yang Digunakan	1.000 M3														
										Jumlah KWH Listrik Yang Digunakan	18.000 KWH														
		1	0	1	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dibayarkan Pajaknya	17 Unit														
		5		5	3	1	6			Jumlah Perpanjangan SIM Yang Dibayarkan	2 Buah														
		1	0	1	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Orang														
		5		5	3	1	8			Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	6 Jenis														

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	0	1	0	0	0	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	19 Jenis													
		1	0	1	0	0	0	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Yang Dicitak	5 Jenis													
										Jumlah Barang Yang Digandakan	67.525 Lembar													
										Jumlah Laporan/ Dokumen Yang Dijilid	294 Buah													
		1	0	1	0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	8 Jenis													
		1	0	1	0	0	0	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	1 Jenis													
		1	0	1	0	0	0	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat Yg Disediakan	20 Kali													
										Jumlah Makan Minum Tamu Yang Disediakan	10 Kali													

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1	0	1	0	0	0	1	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50 Kali														
										Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	8 Kali														
		1	0	1	0	0	0		Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	100 %	-	-	100 %	750.000.000	100 %	787.500.000	100 %	826.875.000	100 %	868.218.750	100 %	3.232.593.750	Sekretariat	Tanah Datar
		1	0	1	0	0	0		Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkap an Gedung Kantor Yang Diadakan	3 Jenis			3 Jenis											
		1	0	1	0	0	0		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	3 Jenis														
		1	0	1	0	0	0		Pemelihara an Rutin/Berk ala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 Unit														
		1	0	1	0	0	0		Pemelihara an Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/ Operasion al	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara	17 Unit														

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1	0	1	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 Unit														
		1	0	1	0	0	0		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat Formal	100 %	-	-	100 %	50.000.000	100 %	52.500.000	100 %	55.125.000	100 %	57.881.250	100 %	215.506.250	Sekretariat	Tanah Datar
		1	0	1	0	0	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bimtek Yang Diikuti	3 Bimtek														
		1	0	1	0	0	0		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	-	-	100 %	28.500.000	100 %	29.925.000	100 %	31.421.250	100 %	32.992.312,50	100 %	122.838.562,50	Sekretariat	Tanah Datar
		1	0	1	0	0	0	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Dokumen														
		1	0	1	0	0	0	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan	2 Dokumen														

Rencana Strategis (Renstra) BPBD 2016– 2021

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	0	1	0	0	0	0	Penyusunan Perencanaan Tahunan	Jumlah Laporan	5 Dokumen													

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun dimulai tahun 2016 hingga tahun 2021 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Datar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target capaian setiap tahun						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase nagari siaga bencana	3,13%	6,25%	6,25%	6,25%	9,38%	12,50%	15,63%	15,63%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Renstra BPBD) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra BPBD ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra BPBD ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahunnya.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
KEPALA PELAKSANA,**

**THAMRIN, ST
NIP. 19660107 199403 1 004**